

JRF Rencana untuk Lanjutkan Dukungan hingga 2011 Dana yang tersedia untuk Mitigasi Resiko Bencana dan Pemulihan Mata Pencaharian

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:
Nia Sarinastiti – 0811856556
Nsarinastiti@worldbank.org

Prambanan, 30 Juli 2009 -- Java Reconstruction Fund dipertengahan waktunya telah menghantarkan apa yang telah direncanakan dalam mengisi kesenjangan dalam membangun rumah sementara, membangun kembali pemukiman untuk 15.000 keluarga yang sekarang telah tinggal di rumah tahan gempa, membangun lebih dari 500 infrastruktur masyarakat, dan meluncurkan dua proyek yang berfokus pada upaya membantu usaha kecil dan menengah (UKM) yang terkena dampak gempa bumi untuk mendukung pemulihan mata pencaharian akibat bencana tersebut ke 13,000 UMKM di DIY dan Jawa Tengah.

“Secara keseluruhan, kinerja portofolio JRF baik, dengan pencapaian-pencapaian dan dampak yang signifikan di lapangan,” kata Shamima Khan, Manajer dari Java Reconstruction Fund. “Untuk dapat memenuhi kebutuhan rekonstruksi yang masih ada, menyelesaikan proyek-proyek pemulihan mata pencaharian yang sedang berjalan, dan menjamin bahwa pengurangan risiko bencana diutamakan dalam perencanaan masyarakat, diharapkan masa kerja JRF dapat diperpanjang hingga sampai bulan Desember 2011.”

Badan Perencanaan Nasional, Bappenas, dan badan perencanaan propinsi, Bappeda telah mengambilalih peran sebagai koordinator rekonstruksi. Mandat Tim Koordinasi Nasional untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Tim Teknis Nasional (TTN) yang berdasarkan pada Dekrit Presiden tahun 2006 telah berakhir pada triwulan ketiga tahun 2008.

Pada kurun tengah waktunya, Proyek Perumahan Berbasis Masyarakat (REKOMPAK) tengah melaksanakan perencanaan permukiman masyarakat (CSP) secara menyeluruh. Proyek tersebut juga memperkenalkan unsur-unsur pengurangan resiko bencana (DRR) melalui CSP di desa-desa terpilih. Berdasarkan pembelajaran, tim proyek mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mengarusutamakan DRR dalam perencanaan dan penyusunan anggaran masyarakat untuk desa-desa tambahan. Secara keseluruhan, 530 sub-proyek prasarana masyarakat sedang dalam pelaksanaan, seperti membangun jalan desa dan jalan setapak, dinding penahan, sanitasi dan pengelolaan sampah, wilayah tangkapan sumber daya air, dan jembatan. Dari proyek-proyek tersebut, 70% telah selesai dan sisanya berada dalam berbagai tahap pelaksanaan.

Dua proyek yang masing-masing dilaksanakan oleh *International Organization for Migration (IOM)* dan GTZ berada pada tonggak penting untuk mengatasi tantangan paling besar bagi pemulihan mata pencaharian, yaitu akses pada keuangan. Perjanjian kerjasama PNM dengan GTZ dan IOM memungkinkan para penerima manfaat angkatan pertama untuk menerima kredit mikro pada kuartal berikutnya di tahun 2009. Permodalan Nasional Madani atau PNM, yang menjadi lembaga utama untuk menyalurkan dana kepada para penerima manfaat, berperan penting dalam skema pembiayaan mikro untuk usaha mikro dan kecil (UMK) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). IOM juga secara langsung memberikan aset-aset pengganti kepada para UMK, sementara GTZ berfokus pada upaya membantu usaha menengah dalam merestrukturisasi pinjaman dan memulihkan kapasitas serta meningkatkan daya saing.



Dari keseluruhan kontribusi sebesar AS\$ 94 juta, delapan puluh persen telah dialokasikan ke proyek-proyek. Lebih dari 71% dari dana ini disalurkan melalui anggaran Pemerintah Indonesia. Terhitung hingga bulan Maret 2009, 72% dari alokasi telah dicairkan. Jumlah dana tersedia yang belum dialokasikan besarnya sekitar AS\$18 juta.

Sebuah Tinjauan Tengah Waktu (*Mid Term Review*) independen terhadap portofolio JRF yang didanai oleh Komisi Eropa pada bulan Februari/Maret 2009 memeringkat JRF sebagai suatu program yang sangat relevan, yang sepenuhnya sejalan dengan tujuan-tujuan Pemerintah Indonesia untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tinjauan tersebut mencatat keberhasilan pendekatan-pendekatan berbasis masyarakat yang menghasilkan pencapaian program secara efisien; tinjauan tersebut juga mencatat perlunya pemantauan untuk proyek-proyek yang berfokus pada pemulihan mata pencaharian karena proyek-proyek tersebut mengalami penundaan yang signifikan dalam memulai kegiatannya.

Sekretariat JRF juga melakukan Inventarisasi dan Analisis Kesenjangan (*Stocktaking and Gap Analysis*) untuk mengetahui kebutuhan rekonstruksi yang masih ada. Tujuan analisis tersebut adalah untuk menginventarisasi upaya-upaya rekonstruksi dan pemulihan Pemerintah Indonesia, JRF serta intervensi yang didanai oleh donor lain; dan menilai kebutuhan yang masih diperlukan dan dapat dilakukan melalui pendanaan JRF sesuai dengan mandatnya dan jangka waktu program. Pengembangan program perencanaan pemukiman masyarakat, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (DRR), dan beberapa inisiatif lain yang diusulkan untuk dipertimbangkan, berdasarkan temuan penilaian atas kebutuhan yang masih ada.

Di masa mendatang, prioritas utama adalah pemograman dana JRF untuk menyelesaikan pelaksanaan. Proyek-proyek yang sedang berjalan harus bekerja sama dengan erat dan sejalan dengan prioritas-prioritas pemerintah. Proyek-proyek mata pencaharian memang diposisikan untuk mendukung UMK; akan tetapi kebutuhan-kebutuhan di lapangan juga berubah-ubah. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan and peninjauan kemajuan proyek secara terus-menerus untuk memastikan proyek-proyek tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang berubah dari waktu ke waktu.

Java Reconstruction Fund (JRF) didirikan berdasarkan permintaan dari Pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya-upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pemerintah di wilayah pasca gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah dan Jawa Barat yang terkena dampak tsunami. JRF dikelola oleh Bank Dunia dengan kontribusi sejumlah AS\$94 juta dari Komisi Eropa dan Pemerintah Belanda, Inggris, Kanada, Finlandia, dan Denmark, serta Bank Pembangunan Asia. Untuk informasi tentang JRF, kunjungi: www.javareconstructionfund.org